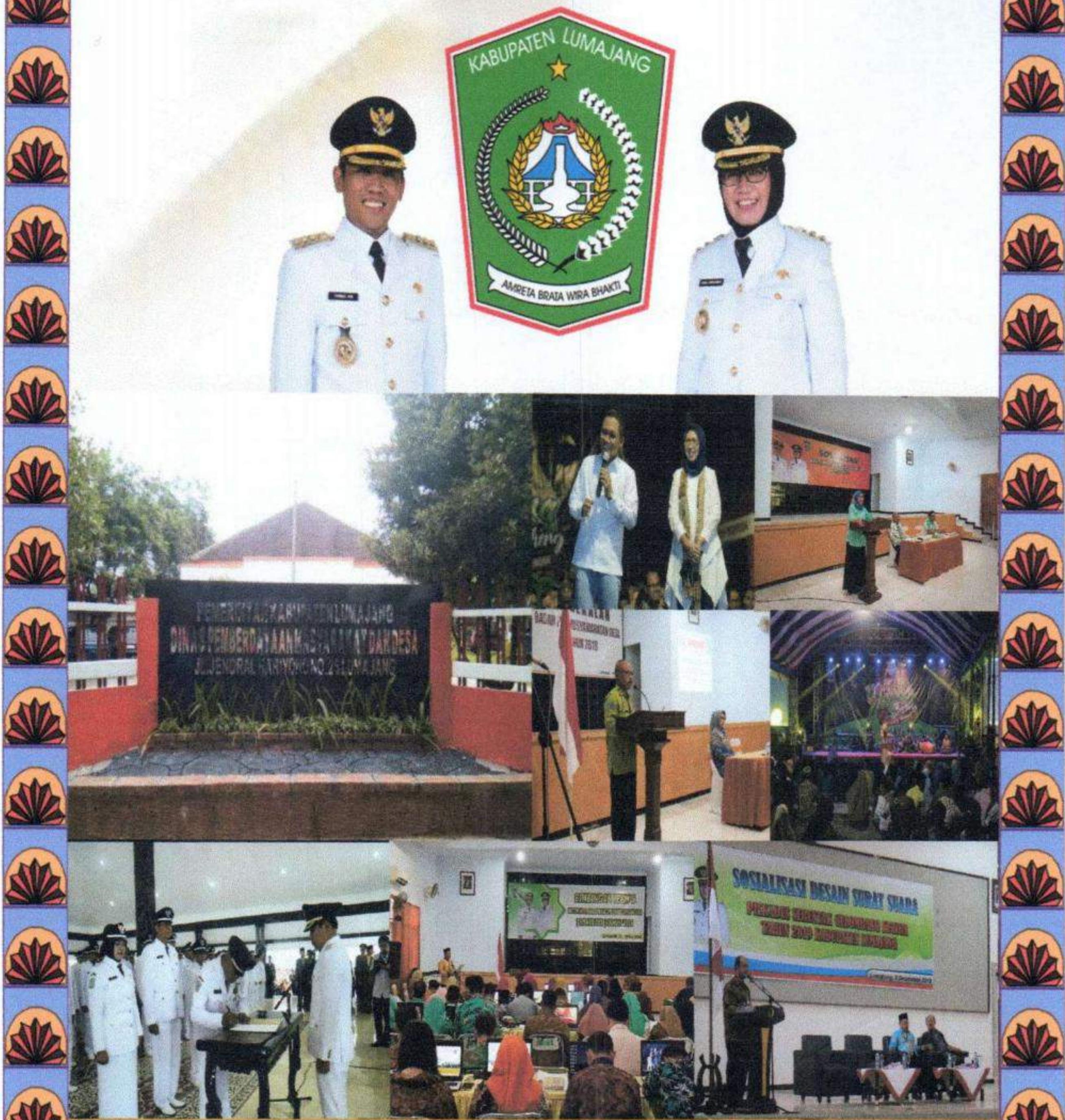


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467
LUMAJANG - 67314



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran.

Dengan memohon Ridho ALLAH SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, kami berharap penyajian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-reforma birokrasi dengan prinsip transparasi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan Review Renstra DPMD tahun 2018-2023.

Lumajang, Pebruari 2020

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.

NIP. 19620911 198303 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum Organisasi.....	2
D. Sumber Daya DPMD	17
E. Sistematika Penulisan	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja Tahunan.....	22
C. Perjanjian Kinerja.....	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019	28
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	38
B. Permasalahan	39
C. Upaya Perbaikan	39

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Matriks Review Renstra DPMD 2018 – 2023
- RKT 2019



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP 2019 ini merupakan pelaporan tahun awal pencapaian kinerja berdasarkan Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang periode 2018-2023. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) yang menyebutkan bahwa Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga indikator kinerja utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini , DPMD telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholders serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang mengacu kepada :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

1.1. Kedudukan

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah dalam urusan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan Desa.



- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Dasar Hukum Kelembagaan

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : " Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ".

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

a. *Sekretariat.*

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai



- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
 - c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain- lain)
 - d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan



- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- f. Melakukan administrasi kepegawaian
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protocol
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- d. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- e. Melakukan urusan perbendahaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- f. Melakukan urusan gaji pegawai
- g. Melakukan administrasi keuangan
- h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain



- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perpendaharaan dan gatirugi
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Penataan Desa
- c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan
- d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Pembinaan tenaga pendamping desa
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Penataan Desa
- 2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

1) Seksi Penataan Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa



- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
- e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Membina Tenaga Pendamping Desa
- g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

2) **Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa
- f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan Produk Hukum Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa



3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa
- c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan Pedesaan
- f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Desa
- g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Desa
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa
- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

1) Seksi Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya)
- d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga Kemasyarakatan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat



- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina Kader Pemberdayaan
- c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) Seksi Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa
- f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data Partisipasi Masyarakat Desa
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat



- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
- d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari

:

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

1) Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)



- c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berkelanjutan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

3) Seksi Kerja Sama Desa, mempunyai tugas :

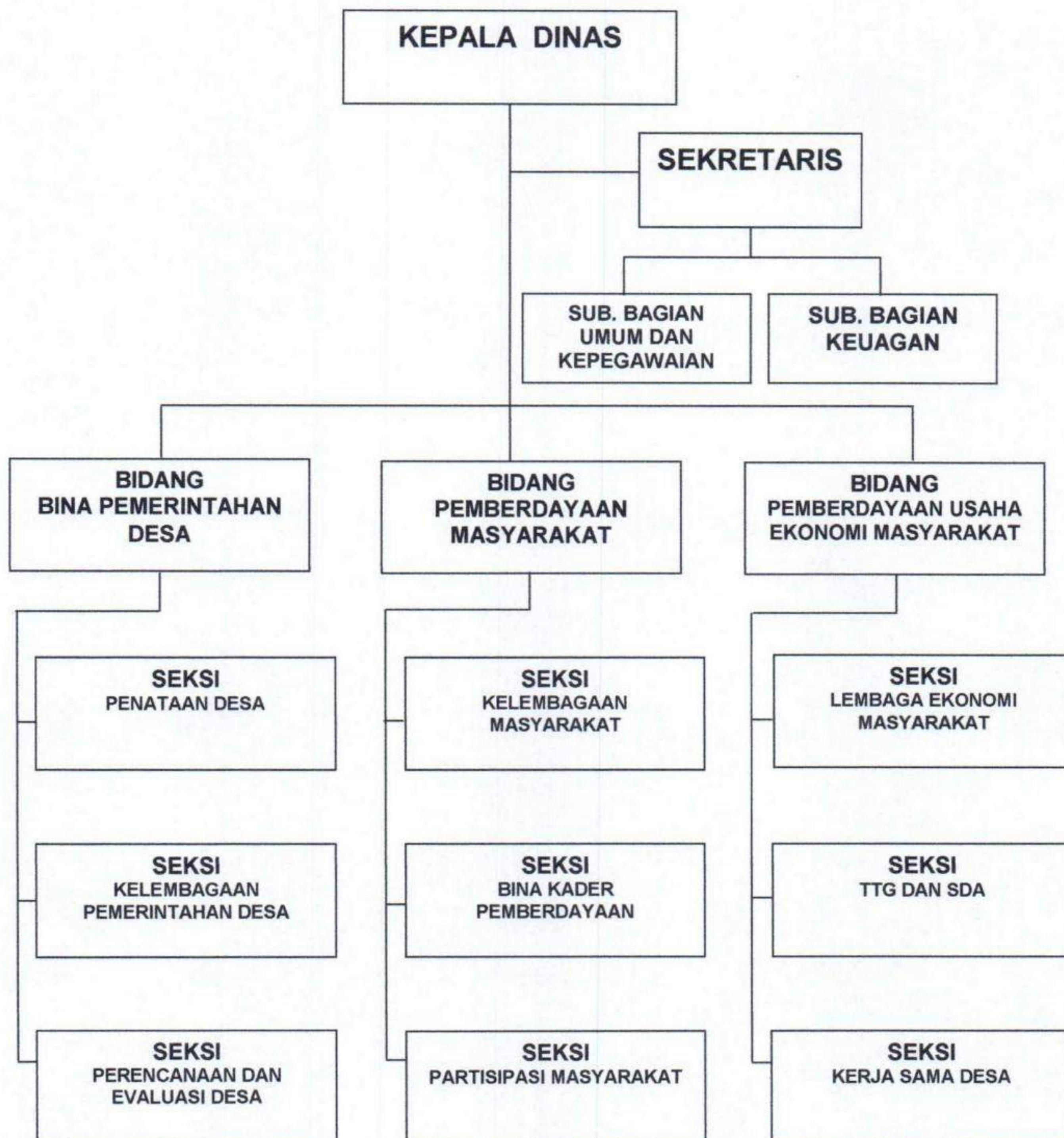
- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama Desa
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa
- d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Antar Desa
- e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak lainnya
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa



- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
LUMAJANG**





D. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki SDM , sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 31 Desember 2019)

NO	URIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah PNS	16	7	23
2.	Jumlah Tenaga Kontrak	16	16	32
3.	Tingkat Pendidikan PNS	16	7	23
	a. SD	2	-	2
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	3	3	6
	d. Diploma III (D3)	1	1	2
	e. Sarjana Strata (S1)	8	2	10
	f. Magister (S2)	2	1	3
4.	Golongan Kepangkatan PNS	16	7	23
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	1	-	1
	I/d	1	-	1
	b. II/a	-	-	-
	II/b	1	-	1
	II/c	1	1	2
	II/d	1	-	1
	c. III/a	-	1	1
	III/b	2	2	4
	III/c	3	-	3
	III/d	3	2	5
	d. IV/a	2	1	3
	IV/b	1	-	1
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-



2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset tetap sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebanyak 320 buah/set atau senilai Rp. 3.382.694.827,-. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang :

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI	
					BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah	1	Bidang	705.695.000	1	
2	Alat-Alat Besar (Generator/Genset)	1	Buah/Set	7.805.000	1	
3	Alat-Alat Angkutan	27	Buah	853.197.327	27	
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Buah	10.000.000	2	
5	Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	267	Buah	1.096.975.500	267	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	Buah	36.750.000	5	
7	Bangunan Gedung	4	Buah	671.622.000	4	
8	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	13	Buah/Set	650.000	13	
JUMLAH		320		3.382.694.827	320	



E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja Tahun 2019 dengan target dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja DPMD disajikan dengan sistematika

I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Gambaran Umum Organisasi
- d. Sumber Daya DPMD
- e. Sistematika Penulisan

II Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis SKPD
- b. Rencana Kerja Tahunan
- c. Perjanjian Kinerja

III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - Pengukuran Kinerja
 - Capaian Kinerja
 - Evaluasi dan Analisis Kinerja

- b. Realisasi Anggaran

IV. Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Permasalahan
- c. Upaya Perbaikan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT**".

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang masuk dalam Misi ke-2 yaitu :

"Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri".

2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.



Tabel 2.1
MISI – TUJUAN

MISI	TUJUAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Cepat Berkembang

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
TUJUAN – SASARAN

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat
		Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan SKPD pada dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan SKPD di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk kurun waktu 2018 – 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan adalah bersifat



terpadu. Artinya strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya parsial, malainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh *stakeholder* mulai dari unsur intern DPMD, SKPD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa melalui beberapa strategi kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.
- b. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA berbasis TTG.
- d. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan teknis yang berbasis teknologi informasi.

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan sebagaimana terlampir .

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2019. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.



No	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terlaksananya Pelayanan adm. Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terlaksananya sarana dan prasarana yang tersedia 2. Terlaksananya sarana dan prasarana yang terpelihara	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Terlaksananya Pelaporan LKj SKPD 2. Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis 3. Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%
4.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<p>1. Terlaksananya Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat</p> <p>2. Terlaksananya Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA</p> <p>3. Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa</p>	Output : - Jumlah KRTP yang terfasilitasi - Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi - Jumlah LKM yang dibina - Jumlah Pemenang Inovasi TTG - Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG - Jumlah Pameran TTG - Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi - Jumlah Pasar Desa yang terbina	- 400 Orang - 135 BUMDes - 60 LKM - 8 Lembaga/ Orang - 50 Orang - 1 Kali - 60 Lembaga - 21 Desa
			Outcomes : - Persentase Desa yang memiliki BUM Desa - Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	- 75% - 50%



No	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
5.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Output : - Jumlah Peserta yang dilatih - Jumlah Alat TTG diserahkan Outcomes : Percentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	- 40 Orang - 20 Unit - 50%
6.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1. Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 2. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 3. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK 4. Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Output : - Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa - Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM - Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi - Jumlah KPMD yang dilatih Outcomes : - Jumlah anggota PKK yang difasilitasi - Jumlah Pengurus LKMD yang dibina - Jumlah RT/RW yang dibina	- 63 Desa - 205 Desa/kel - 1.281 Posyandu - 410 Orang - 1.184 Orang - 615 Orang - 615 Orang - 30% - 81%
7.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Output : - Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa - Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu	- 198 Desa - 100 Desa



No	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		<p>2. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>3. Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak - Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu - Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa - Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu <p>Outcomes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Desa yang pengelolaan keuangan Desa sesuai aturan - Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa - Persentase Desa yang tertib perencanaan pembangunan Desa 	<p>- 158 Desa</p> <p>- 198 Desa</p> <p>- 79 Desa</p> <p>- 198 Desa</p> <p>- 69 Desa</p> <p>- 55%</p> <p>- 40%</p> <p>- 35%</p>

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara



penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2019, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam review renstra DPMD. Adapun Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2019 beserta Indikator Kinerja Utama dan Targetnya adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2%
2	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	100 Jt
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	10%

Pencapaian sasaran di dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
Meningkatnya Swadaya Masyarakat	1 Program	4 Kegiatan
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	2 Program	4 Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	1 Program	3 Kegiatan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang maupun APBD Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < X \geq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”**. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator Capaian}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya diacapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang dapat diilustrasikan pada uraian dibawah ini :

1. Tujuan DPMD

Tujuan DPMD adalah mendukung capaian sasaran Review RPJMD 2018 – 2023 yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator Persentase Desa Cepat Berkembang.



Tabel 3.1

Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Desa Cepat Berkembang	%	-	-	-	20%	16.7%	83.33%	Berhasil
Capaian Rata-rata Sasaran			-				83.33%	

2. Sasaran DPMD (Indikator Kinerja Utama/Eselon 2)

Untuk mencapai tujuan DPMD mempunyai tiga sasaran yaitu :

- Meningkatnya Swadaya Masyarakat dengan indikator Persentase Dana Swadaya Masyarakat
- Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa dengan indikator Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas.

Tabel 3.2

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	1,9%	1,95%	102,6%	2%	2.01% (31.298.990 / 1.559.558.03 5.634x100%)	100,5% (2/2,01x100)	Sangat Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			102,6%				100,5%	

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator Persentase Dana Swadaya Masyarakat, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat terdapat 4 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.689.725.000 yang realisasinya Rp. 1.518.162.352 (89,84%).



Dengan jalannya program diatas dengan pendekatan pemberdayaan melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat maka di tahun 2019 terhimpun swadaya masyarakat kabupaten lumajang sebesar Rp. 31.298.990.000,- dan APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja	2.372.279.829.919,93
2	Belanja Tidak Langsung Pos Belanja Pegawai	771.056.447.420,87
3	Belanja Langsung Pos Belanja Pegawai	41.665.346.865,00
		1.559.558.035.634,06

Dengan data diatas , maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada Indikator Kinerja Sasaran 1 mencapai 2,01% Partisipasi Masyarakat, hasil perhitungan Rp. 31.298.990.000,- dibagi Rp. 1.559.558.035.634,06,- kali 100.

Tabel 3.3
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019				Katagori
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp	0*	0*	0*	100jt	218.532.213 (6.099.976.194 - 5.881.443.981)	218,5%	Sangat Baik	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2							218,5%		

Keterangan * : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat 3 kegiatan dengan anggaran Rp. 542.005.000,- yang realisasinya Rp. 522.435.500,- (96,39%).
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial terdapat 1 Kegiatan dengan anggaran Rp. 100.000.000,- yang realisasinya Rp. 97.070.500,- (97,07%)



Dengan pelaksanaan program diatas dengan pendekatan pemberdayaan Desa melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Pembinaan Lingkungan Sosial maka terjadi Peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, sebagai berikut:

No	Tahun	UPK PNPM-MPd	BUMDesa	UPKu	Jumlah Total
1	2018	5.769.939.231	16.267.300	95.237.450	5.881.443.981
2	2019	6.039.609.494	7.309.500	53.057.200	6.099.976.194

Dari data diatas maka capaian sasaran Strategi 2 Realisasinya melebihi target yaitu dari perhitungan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2019 - Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2018 : Rp. 6.099.976.194 – Rp. 5.881.443.981 = Rp. 218.532.213,-

Tabel 3.4

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	7.5	0*	0*	10%	8.59 % $\frac{17}{198} \times 100\%$	85.9%	Sangat Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3							85.9%	

Keterangan * : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Dari data diatas maka capaian Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa terdapat 3 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.641.256.600,- yang realisasinya Rp. 1.338.356.000,- (81,5%).



Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3 rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebesar 134.97% (sangat baik). Hasil Rata-rata pencapaian kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai sebesar 100,5%
2. Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa sebesar 218.5 %.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 85.9%

3. Indikator Kinerja Individu (Capaian Sasaran Eselon 3)

- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1 " Meningkatnya Swadaya Masyarakat " melakukan 1 Sasaran Program (eselon 3) yaitu :
 - 1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat., dengan indikator Kinerja :
 - ✓ Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
 - ✓ Persentase Anggota PKK yang aktif
- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 " Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa " melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
 - 2) Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan, dengan Indikator Kinerja :
 - ✓ Persentase Desa yang memiliki BUM Desa
 - ✓ Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 3 " Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa " melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
 - 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa., dengan Indikator Kinerja :
 - ✓ Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
 - ✓ Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa



Tabel 3.5
Tabel Capaian Kinerja Individu

Indikator	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
Sasaran 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat.								
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	25	25,49	101,96	30	30,8%	102,6%	Sangat berhasil
Persentase Anggota PKK yang aktif	%	50	80	160	81	96,2%	118,76%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran 1	%			130,98%			110,68%	Sangat berhasil
Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa								
Persentase Desa yang memiliki BUM Desa	%	60	59,98 (1349/2249)	99,97	75	75,25% (149/198)	100,3%	Sangat berhasil
Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	%	45	0*	0*	50	54% (135/250)	108%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran 2	%						104,15%	Sangat berhasil
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa								
Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%	51	0*	0*	55	62.12 % $\frac{123}{198} \times 100\%$	112.94%	Sangat berhasil
Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	32	0*	0*	40	45.45 % $\frac{90}{198} \times 100\%$	113.62%	Sangat berhasil
Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	%	27	0*	0*	35	41.92 % $\frac{80}{198} \times 100\%$	119.77%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Sasaran 3	%						115.44%	

Keterangan * : Belum Bisa diukur karena Perubahan Indikator kinerja di tahun pertama Renstra DPMD 2019-2023 (tahun 2019)

Jadi Rata-rata Sasaran Kinerja Individu Untuk 3 sasaran diatas adalah 110,01% (Sangat Berhasil) dari perhitungan 110,68% (sasaran 1) + 104,15% (sasaran 2) + 115,44% (sasaran 3) dibagi 3 sama dengan 110,01% (Sangat Berhasil).



4. Realisasi Kinerja dibanding SPM Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standart Pelayanan Minimal		Realisasi Kinerja
		Indikator	Nlai	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai SPM jadi Nihil.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis tidak terlapas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana program/kegiatan dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 yang selaras dengan pencapaian target di masing- masing program/kegiatan.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama :

1. Belum semua Kepala Desa mengerti tentang BUMDesa
2. Kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMDesa tentang cara pengelolaan BUMDesa
3. BUMDesa masih belum mampu untuk berkontribusi untuk meningkatkan PADes
4. Belum semua Perangkat Desa menguasai Siskeudes
5. Kurangnya kapasitas SDM Perangkat Desa dan Kesadaran untuk mempelajari Siskeudes
6. Masih banyak Desa yang belum menggunakan SID secara optimal
7. Sebagian desa masih belum memasukan data profil desa
8. Kurangnya antusias Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam berinovasi
9. Kurangnya fasilitas dan perhatian Desa kepada Pasar Desa setempat
10. Tahun 2019 adalah tahun pelaksanaan PILKADES serentak sebanyak 158 Desa, hal ini sangat berpengaruh terhadap peran-peran kelembagaan kemasyarakatan yang ada di desa. Terutama dalam hal memberdayakan masyarakat menjadi menurun.



Strategi untuk mencapai permasalahan yang dihadapi :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat
2. Menyarankan desa untuk memberikan penyertaan modal bila BUMDesa sudah terbentuk
3. Menyarankan Desa untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa
4. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait Pembinaan kelompok Pokmas penerimaan bantuan TTG dan keterkaitan dalam rencana lomba Inovasi TTG
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Desa dan operator Siskeudes
6. Melakukan Bimtek tentang Siskeudes untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan operator
7. Menyarankan Desa untuk menggunakan SID dalam pelayanan Desa
8. Perlu Bimtek terkait updating data Profil Desa
9. Mendorong keterlibatan Pemerintah Desa yang terkait dalam pembinaan dan fasilitasi Pasar Desa
10. Pemerintah Desa untuk lebih memfasilitasi secara bertahap tentang perbaikan fasilitasi Pasar Desa di wilayahnya
11. Penguatan Kelembagaan berbasis Komunitas bagi Kelembagaan Masyarakat
12. Peran dan tugas Kelembagaan Masyarakat bagian dari materi pada saat bimtek Kepala Desa
13. Monitoring evaluasi periodik dan berkelanjutan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2%	2.01%	100,5%	1.689.725.000	1.518.162.352	89.84%



Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat					1.689.725.000	1.518.162.352	89.84%
Sasaran 2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	100jt	218.532.2 13	218.5%	642.005.000	619.506.000	96.49%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					542.005.000	522.435.500	96.39%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial					100.000.000	97.070.500	97.07%
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas	10%	8.59%	85.9%	1.641.256.600	1.338.356.000	81.5%
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa					1.641.256.600	1.338.356.000	81.5%
Rata-rata Capaian Sasaran				134.97%	3.972.986.600	3.476.024.352	87.5%

Melihat tabel diatas terjadi efisiensi anggaran karena dengan realisasi anggaran sebesar 87,5 % telah mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 134.97% senilai 47.47%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 8.164.795.335,- dengan realisasi Rp. 7.392.145.184 (90,54%) Terdiri dari Belanja Tak Langsung Rp. 2.386.983.635,- dengan Realisasi Rp. 2.259.740.717,- (94,67%) dan Belanja Langsung Rp. 5.777.811.700,- dengan Realisasi Rp. 5.132.404.467,- (88,83%). Belanja langsung ini digunakan untuk 7 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian tabel dibawah ini :



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.455.708.200	1.344.808.031	92.38%
1.1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	1.455.708.200	1.344.808.031	92.38%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.700.900	302.197.284	88.96%
2.1	Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	175.778.000	171.176.500	97%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	163.922.900	131.020.784	80%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.416.000	9.374.800	99.56%
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	4.100.000	4.100.000	100%
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.116.000	1.085.800	97.3%
3.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.200.000	4.189.000	99.7%
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	542.005.000	522.435.500	96.39%
4.1	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	281.780.000	275.244.500	97.68%
4.2	Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA	150.475.000	143.956.000	95,66%
4.3	Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa	109.750.000	103.235.000	94,06%
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100.000.000	97.070.500	97.07%
5.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	100.000.000	97.070.500	97.07%
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1.689.725.000	1.518.162.352	89.84%
6.1	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	246.973.000	209.184.650	84.67%
6.2	Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	254.966.000	208.057.322	81,6%
6.3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK	1.040.800.000	973.090.380	93,5%
6.4	Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	146.986.000	127.830.000	86.97%
7	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	1.641.256.600	1.338.356.000	81.54%
7.1	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	226.504.600	202.330.000	89%
7.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.310.913.000	1.058.998.000	80.8%
7.3	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa	103.839.000	77.028.000	74%
	Jumlah	5.777.811.700	5.132.404.467	92,25%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang yang sejak Tahun 2017 merupakan OPD baru yaitu pengabungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Desa.

Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2019 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran yang utama dan analisis kinerjanya.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebesar 134.97% (sangat baik). Hasil Rata-rata pencapaian kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu ke 1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai senilai 100,5%, ke 2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa senilai 218.5 %, dan ke 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa senilai 85.9%. Dan Rata-rata Sasaran Kinerja Individu Untuk 3 sasaran adalah 111,65% (Sangat Berhasil).

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2019 adalah 87.5% sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 134.97%, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.



B. PERMASALAHAN

- 1) Belum adanya pembinaan, penguatan dan monitoring berkesinambungan, Evaluasi terhadap pencapaian sasaran belum terstruktur dengan baik
- 2) Minimnya penyertaan modal kepada BUMDes dari Pemeritahan Desa, Manajemen SDM masih rendah, dan terkendala pemasaran baik produk unggulan desa dan wisata desa.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan terkait Prodeskel pada Desa.

C. UPAYA PERBAIKAN

- 1) Kolaborasi dan sinergitas antar Lintas Sektor dan Lintas program dikemas dalam sebuah gerakan inovatif untuk melakukan intervensi dalam perwujudan desa yang Mandiri, Tertib Administrasi dan Berdaya (MANTAB)
- 2) Penguatan Regulasi Bupati bahwa APBDes tidak hanya berfokus pada infrastruktur, BUMDEs harus menjadi prioritas dan mendapatkan penyertaan modal miniman 200 juta, karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan SDM BUMDes serta MOU dengan buyer agar setiap produk dari desa langsung dibeli oleh Pihak ke tiga.
- 3) Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait dengan Prodeskel.

Lumajang, Pebruari 2020

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
NIP. 19620911 198303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2019

PIHAK KEDUA

H. THORIQUL HAQ, M.ML



SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2 %
2	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp 100.000.000,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	10 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 1.455.708.200,00	APBD KAB.
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 339.700.900,00	APBD KAB.
3	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 9.416.000,00	APBD KAB.
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Rp. 542.005.000,00	APBD KAB.
5	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Rp. 100.000.000,00	DBHCHT
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Rp. 1.689.725.000,00	APBD KAB.
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.641.256.600,00	APBD KAB.
JUMLAH		Rp. 5.777.811.700,00	

Lumajang, 2 September 2019

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADANG ARIFIN P., SSTP, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2019

PIHAK KEDUA
SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PIHAK PERTAMA
DADANG ARIFIN P. SSTP, M.AP
NIP. 19800227 199121 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	55%
		2. Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	40%
		3. Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	35%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.641.256.600,00	
		JUMLAH	Rp. 1.641.256.600,00

Lumajang, 2 September 2019

Plt. KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG

SAAMSUL ARIFIN, SP. MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

KABID
 BINA PEMERINTAHAN DESA

DADANG ARIFIN P., SSTP, M.AP
 NIP. 19800227 199912 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADORI, S.AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2019

PIHAK PERTAMA

HADORI, S.AP
NIP. 19620722 198603 1 013

PIHAK KEDUA

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	30 %
		2. Persentase Anggota PKK yang aktif	81 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	Rp. 1.689.725.000,00
	JUMLAH	Rp. 1.689.725.000,00

Lumajang, 2 September 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG


SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

KABID
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


HADORI S.A.P.
NIP. 19620722 198603 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANIK INDAYATI, SH. MSi
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 18 Juli 2019

PIHAK KEDUA

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PIHAK PERTAMA

NANIK INDAYATI, SH. MSi
NIP. 19640424 198502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa	1. Persentase Desa yang memiliki BUMDesa	75 %
		2. Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Rp. 542.005.000,00
2	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Rp. 100.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 642.005.000,00

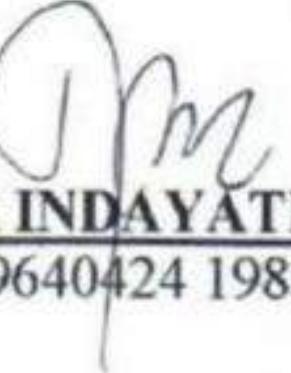
Lumajang, 18 Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG



SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

KABID
 PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI
 MASYARAKAT



NANIK INDAYATI, SH. MSI
 NIP. 19640424 198502 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSUL ARIFIN, SP. MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2019

PIHAK KEDUA


SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PIHAK PERTAMA


SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
NIP. 19620911 198303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi, Sapras Perkantoran serta Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80 %
		Persentase penyusunan laporan tepat waktu	100%

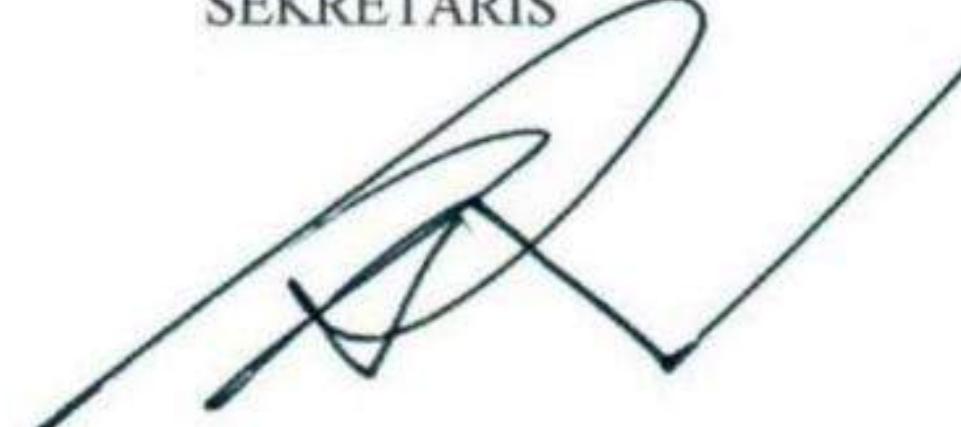
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 1.455.708.200,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 339.700.900,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 9.416.000,00
JUMLAH		Rp. 1.804.825.100,00

Lumajang, 2 September 2019

Plt. KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG


SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

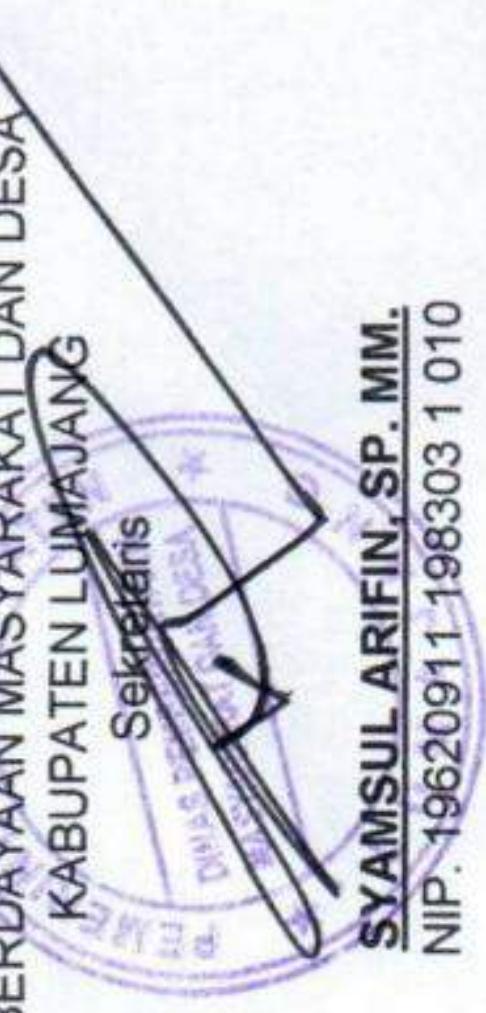
SEKRETARIS


SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DRAFT MATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2018 - 2023

URAIAN	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KETERANGAN
						2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan	1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1 Persentase Desa Cepat Berkembang	- Jumlah Desa Cepat Berkembang dibanding Jumlah Desa x 100	%	16	20	23	25	28	33	
Sasaran Eselon II	1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat	1 Persentase Dana Swadaya Masyarakat	- Jumlah Dana Swadaya Masyarakat dibanding (Jumlah Belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang dikurangi Jumlah Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Lumajang) x100	%	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
	2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	2 Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	SHU Lembaga ekonomi desa th n dikurangi SHU Lembaga ekonomi desa th n-1	Rp. Milyar	4.532	100jt	200jt	300jt	400jt	500jt	Pertumbuhan dari tahun sebelumnya
	3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	3 Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	- Jumlah Desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dibanding Jumlah Desa x 100	%	7.5	10	15	20	25	30	
Eselon III	1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat.	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif dibanding Lembaga Kemasyarakatan yang ada x 100	%	25	30	35	40	45	50	
	2 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan.	2 Persentase Anggota PKK yang aktif	Jumlah Anggota PKK aktif dibanding Anggota PKK Yang ada x 100	%	80	81	82	83	84	85	
	3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1 Persentase Desa yang memiliki BUM Desa	Jumlah Desa yang memiliki BUM Desa dibanding Jumlah Desa x 100	%	66	75	82	88	95	100	
		2 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif dibanding Jumlah Lembaga Ekonomi Desa x 100	%	45	50	55	60	63	66	
		3 Persentase Desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yang yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan dibanding Jumlah Desa x 100	%	51	55	60	65	70	75	
		2 Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dibanding Jumlah Desa x 100	%	32	40	45	50	55	60	
		3 Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yang tertib perencanaan pembangunan desa dibanding Jumlah Desa x 100	%	27	35	40	45	50	55	

Lumajang, April 2019
 PT. KEPALA DINAS
 PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG
 Sekretaris
 SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
 NIP. 19620911 198303 1 010



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

VISI
MISI
TUJUAN

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT

: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

: Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			KET		
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	10	11
1 MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA EKONOMI DESA	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	200JT	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	- Persentase Desa yang memiliki BUM Desa - Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	- 82% - 55%	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : - Jumlah KRTD yang terfasilitasi - Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi - Jumlah LKM yang dibina - Jumlah Pelatihan Off Farm	Rp Orang BUM Desa LKM Keg	437.840.000 560 162 48 1		

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Percentase Dana Swadaya Masyarakat	2,1%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	- Percentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif - Percentase Anggota PKK yang aktif	- 35% - 82%	Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : - Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi - Jumlah Pasar Desa yang terbina	Rp	132.275.000	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Percentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	55%	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : - Jumlah Peserta yang dilatih - Jumlah Alat TTG diserahkan	Rp	128.000.000	
								Orang	40	
								Unit	20	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

URAIAN	INDIKATOR	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			KET
		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Percentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	15%	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	- Percentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan - Percentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa - Percentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	60%	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Masukan : Tersedianya Dana	Rp	1.000.000.000	Masukan : Tersedianya Dana	
							Keluaran : Jumlah anggota PKK yang difasilitasi	Orang	1284	Keluaran : Jumlah Pengurus LKMD yang dibina	
							Masukan : Tersedianya Dana	Rp	225.817.500	- Jumlah RT/RW yang dibina	
							Keluaran : - Jumlah Pengurus LKMD yang dibina - Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	615		
							Masukan : Tersedianya Dana	Rp	310.828.500		
							Keluaran : - Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa	Desa	198	- Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	
							- Jumlah Desa yang penyelesaian APBDesnya tepat waktu	Desa	118		

RENCANA KERJA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Fasilitasi Penyelegaraan Pemerintahan Desa	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran :	Rp	549.436.500	
							- Jumlah Perangkat Desa yang dibina/dibintek	Orang	594	
							- Jumlah BPD yang dibina/dibintek	Orang	594	
							- Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tepat Waktu	Desa	89	
							- Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD	Desa	1	
						Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran :	Rp	136.394.000	
							- Jumlah Desa yg terfasilitasi Up Date Prodeskel	Desa	198	
							- Jumlah Desa yg memiliki data pembangunan desa sesuai peraturan	Desa	198	
							- Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu	Desa	89	
							- Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan SID	Desa	198	

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa - Persentase Dana Swadaya Masyarakat - Persentase Desa dengan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang berkualitas	- 200jt - 2,1% - 15%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100% 60%	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Pembangunan/ Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Masukan : Tersedianya Dana Masukan : Tersedianya Dana	Rp Bulan	1.457.527.210 12	
							Keluaran : Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit,Paket	205.776.790 35	
							Masukan : Tersedianya Dana Masukan : Tersedianya Dana	Unit,Paket	137.500.000 20	
							Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit,Paket		
							Masukan : Tersedianya Dana Masukan : Tersedianya Dana	RP	4.100.000 1	
							Keluaran : Jumlah Laporan LKj OPD Dokumen			

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis	Rp	1.116.000
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1
						JUMLAH			Rp	5.640.000.000

Lumajang, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris



SYAMSULARIFIN, SP. MM.

NIP. 19620911 198303 1 010

JUMLAH DESA CEPAT BERKEMBANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA
1	TEMPURSARI	TEGALREJO	3508012001
2	TEMPURSARI	BULUREJO	3508012002
3	TEMPURSARI	TEMPURSARI	3508012005
4	PRONOJIWO	SIDOMULYO	3508022001
5	PRONOJIWO	PRONOJIWO	3508022002
6	CANDIPURO	CANDIPURO	3508032003
7	CANDIPURO	SUMBEREJO	3508032004
8	CANDIPURO	SUMBERWULUH	3508032005
9	CANDIPURO	SUMBER MUJUR	3508032006
10	CANDIPURO	PENANGGAL	3508032007
11	PASIRIAN	CONDRO	3508042006
12	PASIRIAN	PASIRIAN	3508042008
13	TEMPEH	TEMPEH TENGAH	3508052005
14	TEMPEH	TEMPEH LOR	3508052007
15	TEMPEH	PULO	3508052010
16	KUNIR	SUKOSARI	3508062005
17	YOSOWILANGUN	YOSOWILANGUN LOR	3508072006
18	ROWOKANGKUNG	NOGOSARI	3508082001
19	ROWOKANGKUNG	KEDUNGREJO	3508082002
20	ROWOKANGKUNG	SIDOREJO	3508082003
21	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	3508082004
22	TEKUNG	TUKUM	3508092006
23	SENDURO	SENDURO	3508122004
24	SENDURO	KANDANGTEPUS	3508122006
25	GUCIALIT	WONOKERTO	3508132001
26	PADANG	BODANG	3508142004
27	SUKODONO	DAWUHAN LOR	3508152004
28	SUKODONO	KUTORENON	3508152005
29	SUKODONO	SUMBEREJO	3508152007
30	KEDUNGJAJANG	WONOREJO	3508162005
31	JATIROTO	JATIROTO	3508172006
32	KLAKAH	KLAKAH	3508192009
33	SUMBERSUKO	LABRUK KIDUL	3508212004

Lumajang, Januari 2020
 Plt. KEPALA DINAS
 PEMERINTAHAN
 PEMERINTAHAN
 DIKES PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG



SYAMSUL ARIFIN, SP. MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

**REKAPITULASI LAPORAN SWADAYA MURNI DAN
SWADAYA PENDUKUNG PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	Kecamatan	Jumlah Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Pendukung Program Kegiatan	KET
1	TEMPURSARI	391,000,000	95,140,000	
2	RANDUAGUNG	275,000,000	43,059,000	
3	PRONOJIWO	2,365,603,000	67,693,000	
4	TEMPEH	2,504,240,000	66,045,000	
5	CANDIPURO	2,984,050,000	50,730,000	
6	TEKUNG	153,505,000	57,002,000	
7	PASIRIAN	1,813,300,000	45,465,000	
8	SUKODONO	1,868,449,000	69,110,000	
9	KLAKAH	1,341,450,000	63,741,500	
10	JATIROTO	2,561,139,000	45,052,000	
11	KUNIR	1,683,500,000	4,575,000	
12	RANUYOSO	1,468,862,000	3,960,000	
13	YOSOWILANGUN	1,360,840,000	4,450,000	
14	ROWOKANGKUNG	1,222,700,000	76,500,000	
15	LUMAJANG	2,522,890,000	150,717,000	
16	PASRUJAMBE	221,970,000	43,326,000	
17	SENDURO	1,950,216,000	120,567,500	
18	SUMBERSUKO	1,247,459,000	107,425,000	
19	GUCIALIT	174,155,000	65,791,000	
20	PADANG	583,940,000	61,061,000	
21	KEDUNGJAJANG	1,307,962,000	55,350,000	
	JUMLAH	30,002,230,000	1,296,760,000	
	JUMLAH TOTAL	31.298.990.000		

Lumajang, 14 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR : 8 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Berambah / (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		(Rp.)	%	
1.	PENDAPATAN	2,241,125,533,384.00	2,243,755,152,337.60	2,629,618,953.60 0.11
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	310,870,477,901.00	316,538,321,171.60	5,667,843,270.60 1.82
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	100,000,000,000.00	101,550,000,000.00	1,550,000,000.00 1.55000000
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	50,068,558,902.00	53,473,262,732.00	3,404,703,830.00 6.8000835
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5,210,316,000.00	5,812,735,197.60	602,419,197.60 11.562047
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	155,591,602,999.00	155,702,323,242.00	110,720,243.00 0.0711608
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,486,318,353,483.00	1,465,258,069,503.00	(21,060,283,980.00) (1.41)
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	130,751,987,483.00	134,674,557,041.00	3,922,569,558.00 3.0000076
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1,003,092,909,000.00	1,003,092,909,000.00	0.00 0.00000000
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	352,473,457,000.00	327,490,603,462.00	(24,982,853,538.00) (7.0878680)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	443,936,702,000.00	461,958,761,663.00	18,022,059,663.00 4.05
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	134,029,570,000.00	127,156,952,392.00	(6,872,617,608.00) (5.1276876)
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	118,285,600,000.00	110,422,077,561.00	(7,863,522,439.00) (6.6479119)
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	189,221,532,000.00	189,221,532,000.00	0.00 0.00000000
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	30,000,000.00	33,784,359,000.00	33,754,359,000.00 112514.53
1.3.6.	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	-	2,370,000,000.00	1,373,840,710.00 (996,159,290.00) (42.032038)
	JUMLAH PENDAPATAN	2,241,125,533,384.00	2,243,755,152,337.60	2,629,618,953.60 0.11
2.	BELANJA	2,367,625,533,384.00	2,372,279,829,919.93	4,654,296,535.93 0.19
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,396,313,196,768.00	1,382,304,843,502.87	(14,008,353,265.13) (1.00)

NOMOR	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	791.004.952.759.00	771.056.447.420.87	(19.948.505.338.13) (2.5219191)
2.1.4.	BELANJA HIBAH	155.827.435.000.00	154.697.900.000.00	(1.129.535.000.00) (0.7248627)
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	60.213.310.000.00	62.557.282.933.00	2.343.972.933.00 3.8927821
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	11.028.665.753.00	11.030.665.753.00	2.000.000.00 0.0181346
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	375.738.833.256.00	380.462.547.396.00	4.723.714.140.00 1.2571802
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000.00	2.500.000.000.00	0.00 0.0000000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	971.312.336.616.00	969.974.986.417.06	18.662.649.801.06 1.92
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.001.448.792.00	41.665.346.865.00	2.663.898.073.00 6.8302541
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	634.113.054.162.00	659.402.289.063.91	25.289.234.901.91 3.9881272
2.2.3.	BELANJA MODAL TANAH	176.104.400.00	537.790.400.00	361.686.000.00 205.38158
2.2.4.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	76.744.509.868.00	86.093.217.695.00	9.348.707.827.00 12.181598
2.2.5.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	71.664.446.878.00	60.725.818.828.00	(10.938.628.050.00) (15.263675)
2.2.6.	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	126.787.294.597.00	118.779.950.247.00	(8.007.344.350.00) (6.3155732)
2.2.7.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	15.916.471.319.00	12.250.508.676.00	(3.665.962.643.00) (23.032509)
2.2.8.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	6.909.006.600.00	10.520.064.642.15	3.611.058.042.15 52.265952
	JUMLAH BELANJA	2.367.625.533.384.00	2.372.279.829.919.93	4.654.296.535.93 0.19
	SURPLUS/DEFISIT	(126.500.000.000.00)	(128.524.677.582.33)	(2.024.677.582.33) 1.600535638
3.	PEMBIAYAAN	126.500.000.000.00	128.524.677.582.33	2.024.677.582.33 4.68
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.000.000.000.00	142.024.677.582.33	4.024.677.582.33 2.91
3.1.1.	PENGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	137.000.000.000.00	141.024.677.582.33	4.024.677.582.33 2.9377209
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMERINTAHAN PINJAMAN	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	0.00 0.0000000
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.500.000.000.00	13.500.000.000.00	2.000.000.000.00 17.39
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	8.800.000.000.00	10.800.000.000.00	2.000.000.000.00 22.727273
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	2.700.000.000.00	2.700.000.000.00	0.00 0.0000000
	PEMBIAYAAN NETTO	126.500.000.000.00	128.524.677.582.33	2.024.677.582.33 1.60

NOMOR	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
3.3.	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkalaan (SILPA)	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Lumajang, 23 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

DATA NILAI SISA HASIL USAHA (SHU) LEMBAGA EKONOMI DESA

No	Tahun	PNPM-MPd	BUMDesa	UPKu	Jumlah Total
1	2018	5,769,939,231	16,267,300	95,237,450	5,881,443,981
2	2019	6,039,609,494	7,309,500	53,057,200	6,099,976,194

KENAIKAN SHU = 218,532,213 (3,6%)

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



SYAMSUL ARIFIN, SP., MM.
NIP. 19620911 198303 1 010

DATA REKAP HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN DAN DESA	Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan (penyusunan APBDesa tepat waktu)	Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (Penyusunan LPPDesa Tepat Waktu)	Desa yang tertib perencanaan pembangunan desa (Penyusunan RKPDesa Tepat Waktu)	Desa Cepat Ber-kembang	Desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
I	TEMPURSARI					
1	BULUREJO	1			1	
2	KALIULING					
3	PUNDUNG SARI			1		
4	PUROREJO	1	1	1		
5	TEGALREJO	1			1	
6	TEMPUREJO			1		
7	TEMPURSARI	1			1	
	SUB TOTAL	4	1	3	3	0
II	PRONOJIWO					
8	ORO-ORO OMBO	1	1	1		
9	PRONOJIWO	1	1	1	1	1
10	SIDOMULYO	1	1	1	1	1
11	SUMBERURIP			1		
12	SUPIT URANG			1		
13	TAMAN AYU		1	1		
	SUB TOTAL	3	4	6	2	2
III	CANDIPURO					
14	CANDIPURO				1	
15	JARIT		1			
16	JUGOSARI		1			
17	KLOPOSAWIT					
18	PENAGGAL		1		1	
19	SUMBER MUJUR				1	
20	SUMBEREJO		1		1	
21	SUMBERWULUH		1		1	
22	TAMBAHREJO					
23	TUMPENG					
	SUB TOTAL	0	5	0	5	0
IV	PASIRIAN					
24	BADES	1	1			
25	BAGO					
26	CONDRO				1	
27	GONDORUSO	1	1	1		
28	KALIBENDO	1				
29	MADUREJO	1				
30	NGUTER	1				
31	PASIRIAN	1	1	1	1	1
32	SELOK AWAR AWAR	1	1	1		
33	SELOK ANYAR	1		1		
34	SEMEMU		1			
	SUB TOTAL	8	5	4	2	1
V	TEMPEH					
35	BESUK	1	1			
36	GESANG	1				
37	JATISARI	1				
38	JOKARTO	1				
39	KALIWUNGU	1				
40	LEMPENI	1	1			
41	PANDANARUM	1				
42	PANDANWANGI	1	1			
43	PULO				1	
44	SUMBERJATI	1	1			
45	TEMPEH KIDUL	1	1			
46	TEMPEH LOR	1			1	
47	TEMPEH TENGAH	1	1		1	
	SUB TOTAL	12	6	0	3	0
VI	LUMAJANG					
48	BANJARWARU	1	1	1		
49	BLUKON	1	1			
50	BORENG	1	1	1		
51	DENOK	1				
52	LABRUK LOR	1	1	1		
	SUB TOTAL	5	4	3		0
VII	SUMBERSUKO					
53	GRATI	1		1		
54	KEBONSARI	1	1	1		
55	LABRUK KIDUL	1	1	1	1	1
56	MOJOSARI	1				
57	PETAHUNAN	1		1		
58	PURWOSONO	1	1	1		
59	SENTUL	1				
60	SUMBERSUKO	1	1	1		
	SUB TOTAL	8	4	6	1	1
VIII	TEKUNG					
61	KARANGBENDO	1	1			
62	KLAMPOKARUM	1	1	1		
63	MANGUNSARI	1				
64	TEKUNG	1	1			
65	TUKUM	1	1	1	1	1
66	WONOGRIYO	1		1		
67	WONOKERTO	1	1			
68	WONOSARI	1	1	1		
	SUB TOTAL	8	6	4	1	1

IX	KUNIR					
69	DOROGOWOK	1	1			
70	JATIGONO	1	1			
71	JATIMULYO	1				
72	JATIREJO	1	1			
73	KABUARAN	1				
74	KARANGLO	1				
75	KEDUNGMORO	1	1			
76	KUNIR KIDUL	1				
77	KUNIR LOR	1	1			
78	SUKOREJO	1				
79	SUKOSARI	1	1	1	1	1
	SUB TOTAL	11	6	1	1	1
X	YOSOWILANGUN					
80	DARUNGAN		1	1		
81	KALIPEPE			1		
82	KARANGANYAR	1	1	1		
83	KARANGREJO			1		
84	KEBONSARI			1		
85	KRAI			1		
86	KRATON	1	1	1		
87	MUNDER			1		
88	TUNJUNGREJO			1		
89	WOTGALIH			1		
90	YOSOWILANGUN KIDUL	1	1	1		
91	YOSOWILANGUN LOR	1	1	1	1	1
	SUB TOTAL	4	5	12	1	1
XI	ROWOKANGKUNG					
92	DAWUAN WETAN		1			
93	KEDUNGREJO	1	1	1	1	1
94	NOGOSARI	1	1	1	1	1
95	ROWOKANGKUNG	1	1	1	1	1
96	SIDOREJO	1	1	1	1	1
97	SUMBERANYAR					
98	SUMBERSARI		1			
	SUB TOTAL	4	6	4	4	4
XII	JATIROTO					
99	BANYUPUTIH KIDUL					
100	JATIROTO	1	1	1	1	1
101	KALIBOTO KIDUL			1		
102	KALIBOTO LOR					
103	ROJOPOLO					
104	SUKOSARI	1				
	SUB TOTAL	2	1	2	1	1
XIII	RANDUAGUNG					
105	BANYUPUTIH LOR		1	1		
106	BUWEK					
107	GEDANGMAS		1	1		
108	KALIDILEM					
109	KALIPENGUNG	1		1		
110	LEDOKTEMPO		1			
111	PEJARAKAN		1	1		
112	RANDUAGUNG			1		
113	RANULOGONG	1	1	1		
114	RANUWURUNG		1			
115	SALAK					
116	TUNJUNG		1			
	SUB TOTAL	2	7	6	0	0
XIV	SUKODONO					
117	BONDYUDO	1				
118	DAWUHAN LOR	1	1	1	1	1
119	KARANGSARI	1				
120	KEBONAGUNG	1				
121	KLANTING	1				
122	KUTORENON	1	1	1	1	1
123	SELOKBESUKI	1				
124	SELOKONDANG	1	1			
125	SUMBEREJO	1	1	1	1	1
126	URANGGANTUNG	1	1			
	SUB TOTAL	10	5	3	3	3
XV	PADANG					
127	BARAT	1	1			
128	BODANG	1			1	
129	KALISEMUT	1	1			
130	KEDAWUNG					
131	MERAKAN	1	1			
132	MOJO	1	1			
133	PADANG					
134	TANGGUNG		1			
135	BABAカン	1	1			
	SUB TOTAL	6	6	0	1	0
XVI	PASRUJAMBE					
136	JAMBearum	1	1			
137	JAMBEKUMBU	1				
138	KARANGANOM	1	1			
139	KERTOSARI	1				
140	PAGOWAN	1	1			
141	PASRUJAMBE	1				
142	SUKOREJO	1	1			
	SUB TOTAL	7	4	0		0

XVII	SENDURO				
143	ARGOSARI	1			
144	BEDAYU	1			
145	BEDAYU TALANG	1			
146	BURNO	1			
147	KANDANGAN	1			
148	KANDANGTEPUS		1		
149	PANDANSARI	1			
150	PANDANSARI	1			
151	PURWOREJO	1			
152	SARIKEMUNING	1			
153	SENDURO		1		
154	WONOCEPOKOAYU	1			
	SUB TOTAL	6	0	2	0
XVIII	GUCIALIT				
155	GUCIALIT	1	1		
156	JERUK	1			
157	KENONGO	1			
158	KERTOWONO				
159	DADAPAN		1		
160	PAKEL	1	1	1	
161	SOMBO			1	
162	TUNJUNG	1		1	
163	WONOKERTO	1	1	1	1
	SUB TOTAL	4	4	6	1
XIX	KEDUNGJAJANG				
164	BANDARAN		1		
165	BENCE	1	1		
166	CURAHPETUNG			1	
167	GROBOGAN			1	
168	JATISARI	1	1	1	
169	KEDUNGJAJANG	1		1	
170	KRASAK	1	1	1	
171	PANDANSARI	1			
172	SAWARAN KULON			1	
173	TEMPURSARI	1	1	1	
174	UMBUL			1	
175	WONOREJO	1	1	1	1
	SUB TOTAL	6	5	11	1
XX	KLAKAH				
176	DUREN	1		1	
177	KEBONAN	1		1	
178	KLAKAH	1		1	1
179	KUDUS	1		1	
180	MLAWANG	1		1	
181	PAPRINGAN	1		1	
182	RANUPAKIS	1		1	
183	SAWARAN LOR	1		1	
184	SRUNI	1		1	
185	SUMBERWRINGIN	1		1	
186	TEGALCIUT	1		1	
187	TEGALRANDU	1		1	
	SUB TOTAL	12	0	12	1
	TOTAL	123	90	83	17
	%	62.12%	45.45%	41.92%	16.67%
					8.59%



**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA KETUA RT/RW, LKMD, KPMD DAN
POSYANDU GERBANGMAS TAHUN 2019
SE-KABUPATEN LUMAJANG**

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KEL.					JML	JUMLAH LEMBAGA KEMASYAR AKATAN YANG AKTIF	% LEMBAGA YANG AKTIF	KET
		RW	RT	LKMD	KPMD	POSYANDU GERBANGM AS				
1	TEMPURSARI	48	188	70	14	46	366	129	35.25	
2	PRONOJIWO	64	160	60	12	45	341	124	36.36	
3	CANDIPURO	88	413	100	20	85	706	212	30.03	
4	PASIRIAN	105	506	110	22	72	815	242	29.69	
5	TEMPEH	106	590	130	26	89	941	272	28.91	
6	KUNIR	81	374	110	22	60	647	204	31.53	
7	YOSOWILANGUN	71	393	120	24	73	681	208	30.54	
8	ROWOKANGKUNG	66	188	70	14	44	382	131	34.29	
9	TEKUNG	68	212	80	16	37	413	143	34.62	
10	LUMAJANG	134	538	115	24	121	932	272	29.18	
11	PASRUJAMBE	95	284	70	14	37	500	167	33.40	
12	SENDURO	122	384	120	24	56	706	204	28.90	
13	GUCIALIT	62	221	90	18	50	441	146	33.11	
14	PADANG	70	312	90	18	42	532	174	32.71	
15	SUKODONO	95	362	100	20	50	627	196	31.26	
16	KEDUNGJAJANG	87	320	117	24	54	602	188	31.23	
17	JATIROTO	73	273	59	12	62	479	152	31.73	
18	RANDUAGUNG	141	464	117	24	82	828	205	24.76	
19	KLAKAH	87	302	120	24	62	595	180	30.25	
20	RANUYOSO	55	290	106	22	54	527	158	29.98	
21	SUMBERSUKO	55	279	80	16	38	468	152	32.48	
	JUMLAH	1773	7053	2034	410	1259	12529	3859	660.21	
	JUMLAH TOTAL	8826		2034	410	1259	12529	3859	30.80	

Lumajang, 15 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LUMAJANG



JUMLAH PRESENTASI KADER PKK YANG AKTIF
TAHUN 2019

NO	PKK KECAMATAN	KADER PKK			KADER YANG AKTIF			PERSENTASI	
		TP PKK		JUMLAH	TP PKK		JUMLAH		
		L	P		L	P			
1	TEMPURSARI	8	180	188	7	168	175	93,1%	
2	PRONOJIWO	2	285	287	1	273	274	95,5%	
3	CANDIPURO	2	456	458	1	444	445	97,2%	
4	PASIRIAN	2	386	388	2	374	376	96,9%	
5	TEMPEH	6	377	383	5	365	370	96,6%	
6	KUNIR	4	381	385	3	369	372	96,6%	
7	YOSOWILANGUN	0	328	328	0	316	316	96,3%	
8	ROWOKANGKUNG	0	250	250	0	238	238	95,2%	
9	TEKUNG	0	372	372	0	360	360	96,8%	
10	JATIROTO	4	201	205	4	189	193	94,1%	
11	LUMAJANG	5	438	443	5	426	431	97,3%	
12	PASRUJAMBE	2	216	218	1	205	206	94,5%	
13	SENDURO	9	216	225	9	205	214	95,1%	
14	GUCIALIT	3	281	284	3	270	273	96,1%	
15	PADANG	0	309	309	0	298	298	96,4%	
16	SUKODONO	2	302	304	2	291	293	96,4%	
17	SUMBERSUKO	3	380	383	3	369	372	97,1%	
18	KEDUNGJAJANG	0	273	273	0	262	262	96,0%	
19	RANDUAGUNG	2	240	242	2	229	231	95,5%	
20	KLAKAH	1	259	260	1	248	249	95,8%	
21	RANUYOSO	0	271	271	0	260	260	95,9%	
22	TP PKK KABUPATEN	8	34	42	8	34	42	100,0%	
	JUMLAH	63	6435	6498	57	6193	6250	96,2%	

Lumajang, Februari 2020
 Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa



SYAMSUL ARIFIN, SP, MM
 NIP. 19620911 198303 1 010

DATA REKAP JUMLAH DESA YANG MEMILIKI BUMDESA SE-KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1	Tekung	1. Wonosari 2. Wonokerto 3. Tekung 4. Karangbendo 5. Klampokarum 6. Mangunsari
2	Tempeh	1. Pulo 2. Tempeh Lor 3. Sumberjati 4. Tempeh Kidul 5. Jokarto 6. Lempeni 7. Pandanwangi 8. Tempeh Tengah 9. Pandanarum 10. Gesang 11. Besuk 12. Jatisari 13. Kaliwungu
3	Pronojiwo	1. Sidomulyo 2. Oro-oromo 3. Supiturang 4. Sumberurip 5. Tamanayu 6. Pronojiwo
4	Rowokangkung	1. Dawuhan Wetan 2. Kedungrejo 3. Nogosari 4. Rowokangkung 5. Sidorejo 6. Sumberanyar 7. Sumbersari
5	Candipuro	1. Tumpeng 2. Candipuro 3. Sumberwuluh 4. Sumberejo 5. Penanggal 6. Sumbermujur 7. Jarit
6	Pasirian	1. Condro 2. Pasirian 3. Bades

		4. Gondoruso
		5. Kalibendo
		6. Madurejo
		7. Sememu
		8. Selok Awar-Awar
		9. Selok Anyar
7	Padang	1. Babakan 2. Mojo 3. Tanggung 4. Kedawung 5. Merakan 6. Bodang
8	Pasrujambe	1. Kertosari 2. Pasrujambe 3. Jambekumbu 4. Pagowan 5. Sukorejo 6. Karanganom 7. Jambearum
9	Randuagung	1. Randuagung 2. Kalidilem 3. Banyuputih Lor 4. Kalipenggung 5. Tunjung 6. Buwek 7. Salak 8. Ranulogong 9. Ledoktempuro 10. Pejarakan 11. Ranuwurung 12. Gedangmas
10	Sumbersuko	1. Petahunan 2. Labruk Kidul 3. Kebonsari 4. Sentul 5. Mojosari 6. Purwosono 7. Sumbersuko
11	Kedungjajang	1. Umbul 2. Sawaran Kulon 3. Kedungjajang 4. Curah Petung 5. Bence 6. Wonorejo 7. Pandansari 8. Tempursari 9. Jatisari 10. Grobogan

		11. Krasak
		12. Bandaran
12	Sukodono	1. Uranggantung
		2. Selokgondang
		3. Kutorenon
		4. Sumberjo
		5. Bondoyudo
		6. Karangsari
		7. Klanting
		8. Kebonagung
		9. Dawuhan Lor
		10. Selokbesuki
13	Jatiroto	1. Jatiroto
		2. Banyuputih Kidul
		3. Sukosari
		4. Rojopolo
		5. Kaliboto Kidul
		6. Kaliboto Lor
14	Gucialit	1. Gucialit
		2. Kertowono
		3. Wonokerto
		4. Dadapan
		5. Pakel
15	Tempursari	1. Kaliuling
		2. Pundungsari
		3. Tempursari
16	Yosowilangun	1. Kraton
		2. Munder
		3. Darungan
		4. Karanganyar
		5. Kalipepe
		6. Krai
		7. Wotgalih
		8. Yosowilangun Kidul
		9. Karangrejo
		10. Yosowilangun Lor
		11. Kebonsari
17	Kunir	1. Kunir Kidul
		2. Kedungmoro
		3. Jatigono
		4. Jatirejo
		5. Karanglo
18	Lumajang	1. Labruk Lor
		2. Boreng
		3. Denok
		4. Banjarwaru
19	Senduro	1. Sarikemuning

		3. Purworejo
		4. Pandansari
		5. Ranupani
		6. Bedayu
		7. Wonocempokoayu
20	Klakah	1. Mlawang
		2. Klakah
		3. Duren
		4. Sruni
		5. Sumberwingin
21	Ranuyoso	1. Alun-alun
	JUMLAH	149 BUMDesa

Pit. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

SYAMSUL ARIFIN, SP., MM.
NIP. 19620911 198303 1 010

DATA LEMBAGA EKONOMI BIDANG PEMERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2019

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa			UPKu			BKD			PASAR DESA			UPK PNPM-Mpd		
		AKTIF		NAMA	AKTIF		NAMA	AKTIF		NAMA	AKTIF		NAMA	AKTIF		NAMA
		Y	T		Y	T		Y	T		Y	T		Y	T	
I	Tempursari															
1	Tegalrejo	-	-													
2	Bulurejo	-	-	Sumber Rejeki	-	1 -										
3	Purorejo	-	-	-	-	-										
4	Tempurrejo	-	-	-	-	-										
5	Tempursari	Tempursari	1 -													
6	Pundungsari	Maha	1 -													
7	Kaliluling	Maju Mandiri	1 -													
	Jumlah	-	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 -	Pronojiwo	1
II	Pronojiwo															
8	Sidomulyo	Sumber Makmur	1	-												
9	Pronojiwo	Pronojiwo	1	Mulya Abadi	1	-										
10	Tamanayu	Tamanayu	1	-												
11	Sumberurip	Jaya Gumilang	1	-												
12	Oro-oro Ombo	Lestari	1	-												
13	Supit Urang	Supit Urang	1	-												
	Jumlah		3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1 -	Candipuro	1
III	Candipuro															
14	Jugosari	-	-													
15	Jarit	Sejahtera	1	Sejahtera	-	1	Jarit	-	1	Krempyeng Jarit	1 -					
16	Candipuro	Sentosa	1	-												
17	Sumberejo	Candi Putri	1 -													
18	Sumber Wuluh	Sumber Rejeki	1	-												
19	Sumber Mujur	Mitra Semeru	1	-												
20	Penanggal	Penanggal	-													
21	Tambah Rejo	Tambahrejo Mart	1	-												
22	Klopo Sawit	-	-													
23	Tumpeng	Tumpeng Sejahtera	1	-												
	Jumlah		5	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2 -	Pasirian	1
IV	Pasirian															
24	Gondoruso	Maha Karya	1	-												
25	Kalibendo	Bumdes Kalibendo	1 -													
26	Bades	Sukses Sejahtera	1	Bades	1	-										
27	Bago	-														

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa			UPKu			BKD			PASAR DESA			UPK PNPM-Mpd		
		NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T
28	Selok Awar Awar	Selok Awar Awar	-	1	Barokah Jaya Abadi	1	Mandiri	-	1	-	Pasirian	-	1	Krempyeng Pasirian	-	-
29	Condro	-	-	-	Mugo Mulyo	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30	Madurejo	-	-	-	Pasirian Raharjo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pasirian	-	-	-	Sememu	-	-	1	Berdikari	1	-	-	-	-	-	-
32	Sememu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nguter	-	-	-	-	-
33	Nguter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Selok Anyar	Selokanyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Jumlah	-	-	-	6	3	-	3	1	-	0	2	-	1	-	1
	Tempeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Temppeh	-	1
35	Pandanwangi	Pandawa	1	Sekarwangi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Sumberjati	Sumber Lestari	1	-	Soponyono	1	Al Hikmah	1	-	-	Sumberjati	-	-	-	-	-
37	Tempeh Kidul	-	-	-	Sinar Rejeki	1	Sumber Rejeki	1	Amanah	1	Lempeni	-	-	-	-	-
38	Lempeni	-	-	-	Srikandi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Tempeh Tengah	-	-	-	Bunga	1	-	-	-	-	-	-	-	Krempyeng Tempeh Tengah	1	-
40	Kaliwungu	-	-	-	Barokah Jaya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Tempeh Lor	-	-	-	Barokah Abadi	1	Bina Usaha	1	-	-	Tempeh Lor	-	-	-	-	-
42	Besuk	-	-	-	Jati Mas	1	Mandiri	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Jatisari	-	-	-	Pulo Mandiri	1	Mitra Usaha	1	-	-	Pulo	1	-	-	-	-
44	Pulo	-	-	-	Gesang Sejahtera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Gesang	-	-	-	Sumber Rezeki	1	Lestari	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Jokarto	-	-	-	Podomoro	1	Maju Bahari	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pandan Arum	-	-	-	Jumlah	10	3	8	1	-	0	3	-	Kunir	1	1
VI	Kunir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jatimulyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Jatirejo	Barokah Jaya	1	-	Jatigono Maju	1	Sejahtera	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sukosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kunir Kidul	Kunir Kidul Lestari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kabuaran	Cahaya Berkah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Dorogowok	Sukses Bersama	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

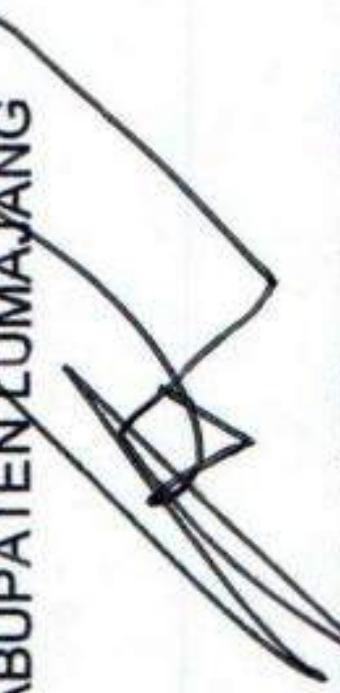
NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa		UPKu		BKD		PASAR DESA		UPK PNPNM-Mpd	
		NAMA		AKTIF Y T		NAMA		AKTIF Y T		NAMA	
Jumlah		4	1			3	0			0	0
VII	Yosowilangun										
59	Darungan	Damar mas	1	-							
60	Kraton	Ramai Jaya	1	Sejahtera	1	-					
61	Wotgalih	Mandiri Sentosa	1	-							
62	Tunjungrejo	-	-								
63	Yosowilangun Kidul	Sumber Rejeki	1	-							
64	Yosowilangun Lor	Jaya Agung	1	-							
65	Krai	Tanjung Mandiri Sejahtera	1	-							
66	Karanganyar	Sinar Jaya	1	-							
67	Karangrejo	Podo Untung	1	-							
68	Munder	Mandiri	1	-							
69	Kebonsari	Kebonsari	1	-							
70	Kalipepe	Sumber Rezeki	1	Amanah	1	-					
Jumlah		4	7			2	0			0	1
VIII	Rowokangkung										
71	Nogosari	Usaha Mandiri	1	-							
72	Kedungrejo	Wira Niaga Bakti	1	-							
73	Sidorejo	Sehati	1	Fajar	-	1	-				
74	Rowokangkung	Berdikari	1	Mitra usaha	-	1	-				
75	Sumbersari	Sejahtera	1	-							
76	Dawuhan Wetan	Wali Songo	1	-							
77	Sumberanyar	Janoko	1	-							
Jumlah		4	3			0	2			0	0
IX	Tekung									Tekung	1
78	Wonogriyo	-									
79	Wonosari	Sari Mulya	1	-							
80	Mangunsari	Sari Makmur	1	-							
81	Tekung	Harapan	1	Rosela Merah	-	1	-				
82	Wonokerto	Kerto Makmur	1	-							
83	Tukum	-									
84	Karangbendo	Makmur jaya	1	Jasmine	-	1	-				
85	Klampokarum	Sekar Arum	1	Srikandi	1	-					
Jumlah		3	3			2	2			0	0
X	Lumajang										
86	Banjarwaru	Banjarwaru	1	-							

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa			UPKu			BKD			PASAR DESA			UPK PNPM-Mpd			
		NAMA		AKTIF	NAMA		AKTIF	NAMA		AKTIF	NAMA		AKTIF	NAMA		AKTIF	
XIII	Gucialit			Y T			Y T			Y T			Y T			Y T	
110	Wonokerto	Wonokerto Sejahtera	1	Sumber Sejahtera	-	1	-										
111	Pakel	Pakel	1	-													
112	Kenongo	-															
113	Gucialit	Gumara	1	Amanat	-	1	-										
114	Dadapan	Harapan Jaya	1	-													
115	Kertowono	Kertowono	1	-													
116	Tunjung	-					Rizky	1	-								
117	Jeruk	-					-										
118	Sombo	-					-										
Jumlah			3	2				1	2			0	0				
XIV Padang														Padang		1	
119	Barat	-					-										
120	Babakan	Babakan	-				1	-									
121	Mojo	Sukses Jaya	-				1	-									
122	Bodang	Bodang	-				1	-									
123	Kedawung	Kedawung	-				1	-						Kedawung	1	-	
124	Padang	-					-										
125	Kalisemut	-															
126	Merakan	Merak Jaya	-				1	Mitra Sejahtera	1	-							
127	Tanggung	Tanggung Untung	-				1	-						Tanggung	1	-	
Jumlah			-	6				1	0						2	-	
XV Sukodono														Sukodono	1		
128	Klanting	Singo Joyo	-				1	Jaya Mandiri	1	-							
129	Kebonagung	Agung Jaya	-				1	Warna Agung	-	1	-						
130	Karangsari	Bundes Karangsari	-				1	-									
131	Dawuhan Lor	Gotong Royong	1	-			-							Dawuhan Lor	-	1	
132	Kutorennon	Jaya Mandiri	1	-													
133	Selokbesuki	Amanah	1	-													
134	Sumberejo	Sumber Rejeki	1	-													
135	Uranggantung	Uranggantung Makmur Jaya	1	-													
136	Selokgondang	Al Amin	1	-													
137	Bondoyudo	Bangun Tresno	1	-													
Jumlah			3	7				1	1			0	1				
XVI Kedungajiang														Kedungajiang	1		
138	Pandansari	Sari Mandiri	1	-													

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa			UPKu			BKD			PASAR DESA			UPK PNPM-Mpd		
		NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T	NAMA		AKTIF Y T
139	Krasak	Mutiara Semeru		1 -												
140	Kedungajang	Maju Jaya		1 -												
141	Wonorejo	Wiraraja		1 -												
142	Umbul	Enak Jaya		1 -												
143	Curahpetung	Usaha Maju		1 -	Usaha Maju		1									
144	Grobogan	Makmur		1 -												
145	Bence	Sejahtera		1 -												
146	Jatisari	Jatisari		1 -												
147	Tempursari	Zam-Zam Sejahtera		1 -												
148	Bandaran	Happy Mart		1 -												
149	Sawaran Kulon	Sri Rejeki		1 -	Sumber Rejeki		1									
	Jumlah			2 10		2 0										
XVII	Jatirotot													Jatirotot	1	
150	Banyuputih Kidul	Bersinar		1 -												
151	Rojopolo	Bumi Seroja		1 -												
152	Kaliboto Kidul	Kaliboto Kidul		1 -												
153	Kaliboto Lor	Samawa		1 -										Kaliboto Lor	1 -	
154	Sukosari	Sukosari Jaya		1 -												
155	Jatirotot	Jaya Makmur		1 -												
	Jumlah			5 1		0 0								1		
XVIII	Randuagung													Randuagung	- 1	
156	Banyuputih Lor	Banyuputih Lor		1 -												
157	Kalidilem	Kalidilem		1 -	Kalidilem Jaya Abadi		1 -									
158	Tunjung	Tunjung		1 -	Mandiri		1 -							Tunjung	1 -	
159	Gedangmas	Gedangmas		1 -												
160	Kalipenggung	Kalipenggung		1 -												
161	Ranulogong	Ranulogong		1 -												
162	Randuagung	Randuagung		1 -												
163	Ledoktempuro	Mulya Abadi		1 -												
164	Pajarakan	Pajarakan		1 -												
165	Buwek	Buwek		1 -	Citra Abadi		1									
166	Ranuwurung	Ranuwurung		1 -												
167	Salak	Salak		1 -												
	Jumlah			- 12		1 3								0 0		1 -

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa			UPKu			BKD			PASAR DESA			UPK PNPM-Mpd			
		AKTIF Y T		NAMA	AKTIF Y T		NAMA	AKTIF Y T		NAMA	AKTIF Y T		NAMA	AKTIF Y T		NAMA	
XIX	Klakah	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
168	Kebonan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
169	Kudus	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
170	Duren	Sido Makmur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
171	Sumberringin	Bringin Makmur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
172	Papringan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
173	Ranupakis	-	-		-	-		-	-		-	-	Ranupakis	1	-		
174	Tegalrandu	-	-		-	-		-	-		-	-	Tegalrandu	-	1		
175	Klakah	Klakah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
176	Mlawang	Sejahtera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
177	Suruni	Barokah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
178	Tegalciut	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
179	Sawaran Lor	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Jumlah		3	2		0	0		0	0		0	1		2	-		
XX Ranuyoso													Ranuyoso	1			
180	Jenggrong	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
181	Meninjo	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
182	Tegalbangsri	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
183	Sumberpetung	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
184	Alun-alun	Sejahtera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
185	Ranubedali	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
186	Ranuyoso	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Ranuyoso	1	-		
187	Wonoayu	-	-		-	-		-	-		-	-	Srikandi	-	1		
188	Penawungan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
189	Wates Kulon	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
190	Wates Wetan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Jumlah		1	-		0	1		0	0		0	0		1	-		
XXI Sumbersuko													Sumbersuko	1			
191	Sumbersuko	Maju Jaya	1	Hidayatul Manafi	1	-											
192	Kebonsari	Sumber Ilmu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
193	Grati	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
194	Labruk Kidul	Labruk Kidul Jaya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
195	Mojosari	Mojosari Mandiri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
196	Sentul	Arta Sejahtera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

NO	KECAMATAN / DESA / KEL	BUMDesa	UPKu						BKD						PASAR DESA						UPK PNPM-Mpd							
			AKTIF		NAMA		AKTIF		NAMA		AKTIF		NAMA		AKTIF		NAMA		AKTIF		Y		T		Y		T	
			Y	T			Y	T			Y	T			Y	T			Y	T			Y	T			Y	T
197	Purwosono	Harapan Kita	1	-																								
198	Petahunan	Tirta Arum	1	-																								
Jumlah			1	6			1	0			0	0																
Jumlah Se Kab.		65	84			30	18			1	11																	
Jumlah Total		149				48				12																		
Jumlah Total Lembaga Yang Aktif																												
Jumlah Total Keseluruhan Lembaga																												
135																												
250																												

PT. KEPALA DINAS
 PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN LUMAJANG


SYAMSUL ARIFIN, SP., MM.
 NIP. 19620911 198303 1 010